

**KINERJA LAPORAN KEUANGAN**  
**DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALEMBANG**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 2017-2021**

Muhammad Deandie Noufal Enrico  
NPP. 30.0926  
Asdaf Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah  
Program Studi Keuangan Publik

Email: [muhammaddean2808@gmail.com](mailto:muhammaddean2808@gmail.com)

Pembimbing Skripsi : Budi Margono,S.Pd, M.Si

**ABSTRACT**

**Problems/Background (GAP):** *The Palembang City Transportation Service is one of the public sector agencies that are within the scope of government institutions, in which all operational costs used by the Palembang City Transportation Service are sourced from the Regional Revenue Expenditure Budget (APBD), so it is certain that the Palembang City Transportation Service adheres to the principles of effectiveness, efficiency, and economy. Purpose:* *To find out whether these principles have been implemented properly or not, it is necessary to measure financial performance because the Palembang City Transportation Service does not have specific measurements of financial performance. Based on these problems, the authors are interested in conducting research on financial performance with the research title "Performance of Financial Reports of the Palembang City Transportation Service, South Sumatra for the 2017-2021 period." 2010-2014, the objective is to determine financial performance through independence ratios, effectiveness ratios, efficiency ratios. Method:* *This study uses a descriptive research method with an inductive approach. The data collection techniques used are observation, interviews and documentation. While data analysis techniques through data reduction, data presentation and drawing conclusions. Results/Findings:* *The results of the study show that the performance of the financial reports of the Palembang City Department of Transportation has been carried out well, but there are still obstacles in its implementation. Conclusion:* *The conclusion is that the Palembang City Transportation Service has not been able to realize the Regional Original Revenue (PAD) target for 2017-2021, and the results of the calculation of financial performance mean that the performance of the Palembang City Transportation Service is still unstable. Judging from the results of the Independence Ratio it is in the high category (Delegative) which means that the Palembang City Transportation Service is good enough but still needs Central Government assistance, whereas if seen from the Effectiveness Ratio it is in the less effective category where the Palembang City Transportation Service is lacking or not approaching the budget target that has been planned, and the Efficiency Ratio is in the inefficient category where the Palembang City Transportation Service has not been able to maximize its own regional revenue (PAD).*

**Keywords:** *Financial Report Performance*

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Dinas Perhubungan Kota Palembang merupakan salah satu instansi sektor publik yang berada dalam ruang lingkup lembaga pemerintah, yang dalam kegiatan operasionalnya seluruh biaya yang digunakan oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), sehingga sudah pasti bahwa Dinas Perhubungan Kota Palembang memegang prinsip efektivitas, efisiensi, dan ekonomis. **Tujuan:** Untuk mengetahui apakah prinsip tersebut telah dijalankan dengan baik atau tidak, maka perlu dilakukan pengukuran terhadap kinerja keuangan karena di Dinas Perhubungan Kota Palembang sendiri tidak terdapat pengukuran khusus terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik melakukan penelitian mengenai kinerja keuangan dengan judul penelitian “Kinerja Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kota Palembang Sumatera Selatan Periode 2017-2021” Penelitian ini menggunakan teori Ratnasari Haliyah Syamsuddin (2015:284-285) mengenai kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang selama tahun 2010-2014, adapun tujuannya untuk mengetahui kinerja keuangan melalui rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan kinerja laporan keuangan Dinas Perhubungan Kota Palembang sudah dilaksanakan dengan baik namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya. **Kesimpulan :** Kesimpulannya bahwa Dinas Perhubungan Kota Palembang belum bisa merealisasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama 2017-2021, dan hasil perhitungan kinerja keuangan disimpulkan bahwa Performa Dinas Perhubungan Kota Palembang masih belum stabil. Dilihat dari hasil Rasio Kemandirian berada di kategori tinggi (Delegatif) yang artinya Dinas Perhubungan Kota Palembang sudah cukup baik namun masih membutuhkan bantuan Pemerintah Pusat, sedangkan jika dilihat dari Rasio Efektivitas berada di kategori kurang efektif dimana Dinas Perhubungan Kota Palembang kurang atau tidak mendekati target anggaran yang telah direncanakan, dan Rasio Efisiensi berada di kategori tidak efisien dimana Dinas Perhubungan Kota Palembang belum mampu memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya.

**Kata Kunci:** Kinerja Laporan Keuangan

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sejak Indonesia menerapkan adanya kebijakan otonomi daerah pada tahun 2001 dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka membuat tata pemerintahan daerah di Indonesia mengalami perubahan yang sebelumnya bersifat sentralisasi menjadi desentralisasi. Definisi dari desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Berdasarkan undang-undang tersebut, semua kewenangan pemerintahan diserahkan kepada daerah, kecuali kewenangan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Tujuan diberlakukannya otonomi daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan yang baik tersebut akan dapat tercapai apabila didukung dengan pengelolaan keuangan yang baik pula. Untuk

itu, ketersediaan sumber daya manusia Pemerintah Daerah yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik terhadap pengelolaan keuangan daerah mutlak harus dipenuhi. Salah satu kebijakan penting yang berada didalam otoritas pemerintah adalah kebijakan fiskal, dimana negara berperan dalam mengatur kegiatan ekonomi agar tetap terjaga stabilitas dan kesejahteraan rakyatnya. Pemerintah Daerah terus melakukan perbaikan terutama dari segi tata kelola pemerintahan. Menurut Fahrni (2012:1) menjelaskan bahwa: Laporan keuangan secara garis besar dibutuhkan oleh dua pihak yaitu pihak internal dan eksternal. Pengelolaan keuangan daerah, telah diatur didalam UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mewajibkan kepada Presiden, Gubernur, Walikota dan Bupati untuk berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa Laporan Keuangan, salah satu laporannya adalah laporan realisasi anggaran. Bentuk laporan pertanggung- jawaban kepada masyarakat yaitu laporan keuangan sebagai hasil dari Akuntansi Sektor Publik (ASP). Menurut Nurfadillah (2016: 1) menjelaskan bahwa: Salah satu laporan keuangan yang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah adalah Laporan Realisasi Anggaran. Laporan realisasi anggaran adalah unsur laporan keuangan daerah yang pertamanya dihasilkan sebelum, selanjutnya diisyaratkan untuk membuat laporan arus kas dan laporan neraca. Dinas Perhubungan merupakan salah satu instansi sektor publik yang berada dalam ruang lingkup lembaga pemerintah, yang dalam kegiatan operasionalnya seluruh biaya yang digunakan oleh Dinas Perhubungan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), sehingga sudah pasti bahwa Dinas Perhubungan memegang prinsip efektivitas, efisiensi, dan ekonomis. Dari laporan keuangan Dinas Perhubungan Kota Palembang maka dapat diketahui Kinerja Keuangan Dinas Perhubungan Kota Palembang tentu saja laporan keuangan Dinas Perhubungan perlu dianalisis lebih lanjut untuk melalui kinerja keuangan secara lebih menyeluruh apakah dalam kondisi baik atau buruk. Berdasarkan laporan keuangan dari Dinas Perhubungan diketahui bahwa dalam periode tertentu terjadi defisit anggaran pada Dinas Perhubungan Kota Palembang. Fenomena ini harus dianalisis dengan rasio keuangan dinas sehingga dapat dinilai tingkat kinerja keuangan pada Dinas Perhubungan Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Dinas Perhubungan Kota Palembang secara pasti menggunakan anggaran pendapatan dan pendapatan daerah untuk pengeluaran pendapatan operasional maupun pendapatan modal, agar tidak terjadi penyelewengan dalam pengelolaannya. Berdasarkan latar belakang diatas maka dalam penulisan Proposal Skripsi ini penulis mengambil judul: “Kinerja Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Periode 2017-2021”.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Dinas Perhubungan merupakan salah satu instansi sektor publik yang berada dalam ruang lingkup lembaga pemerintah, yang dalam kegiatan operasionalnya seluruh biaya yang digunakan oleh Dinas Perhubungan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), sehingga sudah pasti bahwa Dinas Perhubungan memegang prinsip efektivitas, efisiensi, dan ekonomis. Untuk mengetahui apakah prinsip tersebut telah dijalankan dengan baik atau tidak, maka perlu dilakukan pengukuran terhadap kinerja keuangan, karena di Dinas Perhubungan Kota Palembang sendiri tidak terdapat pengukuran khusus terhadap kinerja keuangan. Dari laporan keuangan Dinas Perhubungan Kota Palembang maka dapat diketahui Kinerja Keuangan Dinas Perhubungan Kota Palembang tentu saja laporan keuangan Dinas Perhubungan perlu dianalisis lebih lanjut untuk melalui kinerja keuangan secara lebih menyeluruh apakah dalam kondisi baik atau buruk. Berdasarkan laporan keuangan dari Dinas Perhubungan diketahui bahwa dalam periode tertentu terjadi defisit anggaran pada Dinas Perhubungan Kota Palembang. Fenomena ini harus dianalisis dengan rasio keuangan dinas sehingga dapat dinilai tingkat kinerja keuangan pada Dinas Perhubungan

Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Dinas Perhubungan Kota Palembang secara pasti menggunakan anggaran pendapatan dan pendapatan daerah untuk pengeluaran pendapatan operasional maupun pendapatan modal, agar tidak terjadi penyelewengan dalam pengelolaannya. Menjalankan program anggaran pendapatan dari tahun 2017-2021 Dinas Perhubungan Kota Palembang masih mengalami perbedaan yang signifikan antara anggaran pendapatan dengan realisasi pendapatan, maka dari itu dari perbedaan yang signifikan tersebut perlu ditindaklanjuti terhadap anggaran pendapatan dengan realisasi pendapatan.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, 1 berjudul Analisis Pengukuran pemerintah daerah dengan menggunakan prinsip *value for money* (Studi kasus Pemerintah kabupaten pinrang) (Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Visioner Vol. 13 No. 1 (2021)), menemukan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah Kabupaten Pinrang selama tahun 2010-2014 tidak ekonomis karena memiliki rata-rata rasio ekonomilebih dari 100% yaitu 104.63%. Dari segi efisiensi Kinerja yaitu efisien karena memiliki rata-rata rasio efisiensi 95.89%. Dan dari segi efektivitas, rata-rata rasio efektivitas yaitu 108.26% yang menunjukkan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang selama tahun 2010- 2014 sangat.efektif.Penelitian Rahmayati berjudul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013 menemukan bahwa Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjomasih belum optimal. Walaupun dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah sudah efektif dan efisien, tetapi tingkat kemandirian daerah masih sangat rendah. Hal ini dapat dibuktikan dari besarnya bantuan dari pusat dan provinsi dibandingkan dengan pendapatan asli daerah Kabupaten Sukoharjo. Selain itu, dalam penggunaan dananya masih belum berimbang karena sebagian besar dana digunakan untuk belanja operasi dari pada belanja modal. Penelitian Fitrah Ramadhan berjudul Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan menemukan bahwa Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa secara umum kinerja keuangan daerah Kabupaten Bulukumba masih tergolong rendah, yang dilihat dari beberapa rasio keuangan Kabupaten Bulukumba pada tahun 2020 antara lain rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bulukumba Sebesar 13,49 %, rasio efektivitas 95,60%, rasio efisiensi84,37 %, rasio keserasian 76,25 %, dan rasio pertumbuhan -2,63 %. Selain itu kinerja BPKD Kabupaten Bulukumba telah efektif namun dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut masih mengalami beberapa masalah karena terdapat faktor-faktor penghambat yang ada sehingga menghambat proses kinerja keuangan daerah Kabupaten Bulukumba.

### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni terletak pada konsep yang digunakan dimana penelitiannya menggunakan Konsep *Value For Money* yang hanya memfokuskan pada aspek kemandirian, efektivitas dan, efisiensi.

### **1.5. Tujuan.**

Untuk mengetahui apakah prinsip tersebut telah dijalankan dengan baik.atau tidak, maka perlu dilakukan pengukuran terhadap kinerja keuangan karena di Dinas Perhubungan Kota Palembang sendiri tidak terdapat pengukuran khusus terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik melakukan penelitian mengenai kinerja keuangan dengan judul penelitian “Kinerja Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kota Palembang Sumatera Selatan Periode 2017-2021” Penelitian ini menggunakan teori Ratnasari Haliyah Syamsuddin (2015:284-285) mengenai kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang

selama tahun 2010-2014, adapun tujuannya untuk mengetahui kinerja keuangan melalui rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi.

## II. METODE

Jenis metode penelitian kualitatif yang digunakan yaitu metode deskriptif yang merupakan upaya untuk menggambarkan secara sistematis terhadap suatu situasi masalah, fenomena dalam rangka menyediakan informasi tentang suatu kondisi dari permasalahan tersebut.

Menurut Nazir (2014:43) menyatakan bahwa: Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Penelitian ini selain menggunakan metode deskriptif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan induktif. Pendekatan induktif merupakan pendekatan yang memberikan pemahaman suatu konsep yang bersifat khusus ke umum, dan dapat menarik kesimpulan secara umum dari fakta yang ada dilapangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi dari Kinerja Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kota Palembang jika dilihat atau dinilai menggunakan rasio keuangan dengan dengan mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari Dinas Perhubungan Kota Palembang berupa data-data laporan realisasi anggaran Dinas Perhubungan Kota Palembang memberikan gambaran yang cukup jelas untuk penulis menganalisis serta membandingkan dengan teori yang ada.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Analisis Hasil Penelitian Kinerja Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021

Analisis kinerja laporan keuangan Dinas Perhubungan kota Palembang ini adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan ataupun kegiatan Dinas Perhubungan kota Palembang dalam bidang keuangan untuk kurun waktu 2017-2021. Rasio yang digunakan peneliti dalam menganalisis kinerja keuangan pada kinerja laporan keuangan pada penelitian ini adalah Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, dan Rasio Efisiensi. Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran dari Dinas Perhubungan kota Palembang. Dengan data yang telah didapat peneliti juga akan memaparkan ekuitas pada penelitian.

#### Rasio Efektivitas

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang disebabkan oleh beberapa factor yang berpengaruh terhadap unsur-unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut. Berikut ini tabel unsur-unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang tahun anggaran 2017-2021 :

**Tabel 4.1 Rasio Efektivitas**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Pendapatan</b>	<b>Target Pendapatan</b>	<b>Rasio Efektivitas Pendapatan (%)</b>
2017	13.064.346.640,00	20.000.000.000,00	65,32%
2018	13.384.532.559,00	20.000.000.000,00	66,92%
2019	14.743.597.522,00	20.000.000.000,00	73,71%
2020	12.139.466.166,00	22.500.000.000,00	53,95%
2021	11.499.772.810,00	22.500.000.000,00	51,11%
Rata-Rata Rasio Efektivitas PAD			62,20%

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Palembang

### **Rasio Efisiensi**

Rasio Efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila Rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik. Rasio Efisiensi Kinerja Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017-2021 diformulasikan sebagai berikut:

**Tabel 4.2 Rasio Efisiensi**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Belanja</b>	<b>Realisasi Pendapatan</b>	<b>Rasio Efisiensi (%)</b>
2017	31.673.365.145,00	13.064.346.640,00	242,44%
2018	33.366.466.451,00	13.384.532.559,00	249,29%
2019	43.819.092.825,00	14.743.597.522,00	297,20%
2020	45.175.296.863,00	12.139.466.166,00	372,13%
2021	51.987.984.398,00	11.499.722.810,00	452,08%
Rata-Rata Rasio Efisiensi			322,63%

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Palembang

Berdasarkan tabel 4.4 di atas maka perhitungan rasio efisiensi keuangan Dinas Perhubungan Kota Palembang pada tahun 2017-2021 memiliki kenaikan dan penurunan yang termasuk dalam kategori sangat efisien.

### 3.2 Analisis Hasil Penelitian Pertumbuhan Pendapatan dan Belanja di Dinas Perhubungan Kota Palembang

Analisis hasil penelitian pertumbuhan pendapatan dan belanja di Dinas Perhubungan Kota Palembang ini adalah hasil perhitungan Pertumbuhan Belanja akan direkapitulasi dengan menggunakan tabel berikut :

**Tabel 4.3 Perhitungan Pertumbuhan Belanja Dinas Perhubungan Kota Palembang Tahun 2017-2021**

Tahun	Realisasi Belanja Tahun (RP)	Rasio Pertumbuhan Belanja	Kriteria Kemampuan
(1)	(2)	(3)	(4)
2017	31.673.365.145,00	-	-
2018	33.366.466.451,00	5,35%	Positif
2019	43.819.092.825,00	31,33%	Positif
2020	45.175.296.863,00	3,10%	Positif
2021	51.987.984.398,00	15,08%	Positif

Sumber : Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.6 secara umum Analisis Pertumbuhan Belanja Dinas Perhubungan Kota Palembang menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Belanja Dinas Perhubungan Kota Palembang mengalami pertumbuhan positif. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan yang positif yaitu 13,71%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu 31,33%, sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2011 yaitu 3,10%. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan Kinerja Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Perhubungan Kota Palembang periode 2017-2021 dilihat dari pertumbuhan belanja sudah naik.

Kepala Subbagian Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kota Palembang Mengatakan bahwa :

Realisasi Belanja Dinas Perhubungan Kota Palembang disesuaikan dengan kondisi Realisasi Pendapatan Dinas Perhubungan Kota Palembang. Hal ini menyatakan bahwa dalam penyesuaian tersebut dilakukan dengan Realisasi Belanja Dinas Perhubungan Kota Palembang yang sesuai dengan Realisasi Pendapatan Dinas Perhubungan Kota Palembang yang merupakan peran utama dalam melihat tingkat efisiensi keuangan suatu daerah atau dinas. Oleh karena itu disesuaikan dengan Realisasi Pendapatan yang dimiliki Dinas Perhubungan Kota Palembang pada tahun anggaran yang bersangkutan.

### **3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Kinerja keuangan Dinas Perhubungan Kota Palembang tahun 2017-2021 dilihat dari perhitungan rasio efektivitas dikategorikan kurang efektif dapat dilihat dari rata-rata rasio efektivitas PAD sebesar 62,20% hal ini dikarenakan Dinas Perhubungan Kota Palembang dalam merealisasikan pendapatan daerahnya kurang baik, dengan kata lain realisasi pendapatan Dinas Perhubungan Kota Palembang kurang atau tidak mendekati target anggaran yang telah direncanakan.

### **3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)**

Peneliti menemukan Dinas Perhubungan Kota Palembang berupaya mengurangi dana transfer dari Pemerintah Pusat dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk pertumbuhan dan pendapatan di Dinas Perhubungan Kota Palembang dari tahun 2017-2021, maka Dinas Perhubungan Kota Palembang lebih memperhatikan pertumbuhan pendapatan yang bergerak secara negatif serta lebih memaksimalkan dalam pengelolaan potensi pendapatan didaerahnya. Sedangkan, untuk pertumbuhan belanja dari tahun 2017-2021. Dinas Perhubungan Kota Palembang sangat memperhatikan peningkatan pendapatan daerah agar penurunan pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun bisa diminimalisir.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan pembahasan kinerja keuangan Dinas Perhubungan kota Palembang selama tahun 2017-2021 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : Hasil Perhitungan Rasio Keuangan :Rasio Efektivitas, Kinerja keuangan Dinas Perhubungan Kota Palembang tahun 2017-2021 dilihat dari perhitungan rasio efektivitas dikategorikan kurang efektif dapat dilihat dari rata-rata rasio efektivitas PAD sebesar 62,20% hal ini dikarenakan Dinas Perhubungan Kota Palembang dalam merealisasikan pendapatan daerahnya kurang baik, dengan kata lain realisasi pendapatan Dinas Perhubungan Kota Palembang kurang atau tidak mendekati target anggaran yang telah direncanakan. Rasio Efisiensi, Kinerja keuangan Dinas Perhubungan Kota Palembang dari tahun 2017-2021 dilihat dari rasio efisiensi dikategorikan kategorikan tidak efisien dapat dilihat dari rata-rata rasio efisiensi sebesar 322,63% hal ini dikarenakan kinerja dinas perhubungan kota Palembang belum mampu memaksimalkan PAD nya, meskipun sudah mampu menekan belanja daerahnya dari yang telah dianggarkan sebelumnya. Analisis Pertumbuhan Belanja Dinas Perhubungan Kota Palembang menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Belanja Dinas Perhubungan Kota Palembang mengalami pertumbuhan positif. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan yang positif yaitu 13,71%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu 31,33%, sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2011 yaitu 3,10%. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan Kinerja Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Perhubungan Kota Palembang periode 2017-2021 dilihat dari pertumbuhan belanja sudah naik.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kantor saja.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi **DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALEMBANG**

**PROVINSI SUMATERA SELATAN.**

#### **IV. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Barat beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

#### **V. DAFTAR PUSTAKA**

- Andirfa, Mulya. (2018). *Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Aceh: Unimal Press.
- Aan Komariah, Djam'an Satori. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Emzir, 2016. *Metodelogi penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm: 66
- Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Habibi, H. (2021). Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pada Institut Agama Islam Negeri Bone. *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 11(2), 122-132.
- Halim Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi, Jakarta, Salemba Empat.
- Harsin, A. (2017). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Sungairaya Kecamatan Sungairaya Kabupaten Kuburaya Provinsi Kalimantan Barat. *JE & KP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)*, 1-17.
- Idris, 2018. *Kinerja Keuangan Daerah*. Makasar : De La Macca, hlm: 257
- Khan, A. (2021). Optimalisasi Pelayanan Publik Bagi Pemimpin di Era Digitalisasi di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 14(2), 9-14.
- L. Moleong, 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT RemajaRosdakarya, hlm: 34-35
- Nisa, A., & Hanifah, N. (2020). Analysis of Effectiveness and Efficiency of Padang Puskesmas Expenditure Budget Realization 2016- 2019. *Assets: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak*, 4(2), 78-82.
- Nusantara, B. I. (2021). *Implementasi Digitalisasi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Era Pandemi Covid-19 Di Desa Kembang Kerang Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat* (Doctoral dissertation, IPDN Jatinangor).
- Pebriani, L. E. (2019). Analisis Realisasi Anggaran Dalam Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Singaraja Tahun 2016-2018. *Vokasi: Jurnal Riset Akuntansi*, 8(2), 48-53.

Purnamasari, H., & Ramdani, R. (2019). Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Karawang. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 4(2), 136-149.

Renaldi, R. (2021). Analisis Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pada Instansi BPPSDMP. *Jamak: Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2(1), 103-114.

Desa (siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal*, 9(2), 92-100.

Siti, 2019. *Keuangan Daerah*. Bandung: PT. Rineka Cipta, hlm 64

Suwendra, Wayan I, 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*. Bandung : Nilacakra, hlm: 4-5

Wijaya, E., Anggraeni, R., & Bachri, R. (2013). Desa Digital: Peluang untuk Mengoptimalkan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(1), 75

